



## Desa Ditantang Kelola Dana Rp 1,6 Miliar

NEGARA, NusaBali

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa, bisa jadi suatu yang sangat ditunggu-tunggu. Dari hasil pembahasan Kementerian Keuangan dengan DPR RI, anggaran yang bakal diterima tahun 2015 ini, mencapai Rp 1,6 miliar per Desa. Dana tersebut bersumber dari Alokasi Dana Perimbangan (ADP) Rp 1,3 miliar, ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 300 juta.

Jumlah dana yang akan turun tersebut, diungkapkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dalam sambutannya yang dibacakan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Bali, Ida Bagus Gede Kartika Manuaba, saat mensosialisasikan kebijakan dana desa di Gedung Kesenian Bung Karno (GKBK) Jembrana, Kamis (11/6). ADP Desa tersebut, akan dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing sebesar 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen.

Lebih jauh dijelaskan, untuk pencairan ADP Desa tahap pertama 40 persen, diwajibkan adanya Peraturan Desa terlebih dahulu, terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sementara untuk desa-desa di Jembrana, itu sudah dilakukan, dan dananya sudah ditransfer pada bulan Mei lalu. Sedangkan untuk pencairan tahap kedua 40 persen, Desa juga diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dananya paling lambat bulan Juli tahun ini.

Apabila laporan tidak dilakukan, implikasinya akan terjadi penundaan pencairan. "Bupati berwenang melakukan penundaan pencairan dana jika desa terlambat menyampaikan laporan," kata Kartika Manuaba.

Sedangkan mengenai tatacara penggunaan ADP maupun ADD, seluruh Kepala Desa diberikan bimbingan teknis. Ini untuk menghindari kasus hukum terhadap penggunaan anggaran tersebut. Pasalnya, ketika salah digunakan, bisa saja kasus hukum yang sering mencuat di atas tingkat Desa, akan bergeser ke Desa.

Dalam sosialisasi tersebut, ikut hadir Anggota Komis XI DPR RI, Gusti Agung Rai Wirajaya. Menurutnya, Jembrana harus mampu menggunakan anggaran Pusat tersebut, dengan sebaik-baiknya. Terlebih tahun ini, Jembrana mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Bali.

Untuk itu diingatkan tentang perencanaan yang harus disusun dengan cermat, dan dilaksanakan dengan baik. "Saya tidak ingin mendengar dari rekan kerja kami (Kemenkeu) di Pusat, terjadi penyalahgunaan anggaran di Jembrana, karena pemberian dana Desa ini merupakan tantangan yang cukup berat," ujar Rai Wirajaya.

Sementara Bupati Jembrana, I Putu Artha, dalam kesempatan itu, menegaskan, supaya seluruh Kepala Desa serius mengikuti sosialisasi ini. Terutama soal tata cara pengelolaan ADP dan ADD itu. Bupati Artha, juga meminta program yang disusun benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Desa masing-masing.

Sempat juga disinggung mengenai perolehan WTP Jembrana tahun ini. Menurut Bupati Artha, predikat itu bukan hanya karena Bupati dan Wakil Bupati, tetapi kerja keras seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat, termasuk Desa. "Buatlah program yang bisa melibatkan lebih banyak masyarakat setempat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan, sehingga dananya berputar di desa," pesan Bupati Artha yang juga mengusulkan agar penggunaan ADP bisa secara swakelola, sehingga masyarakat desa lebih banyak yang ikut berpartisipasi.

Dalam sosialisasi yang diikuti para perangkat di Desa tersebut, tampak juga dihadiri Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, Wakil Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan, Setda Jembrana, Gede Gunadnya, dan sejumlah Kepala SKPD. Begitu juga hadir Ketua Majelis Madya Desa Pekraman dan sejumlah Ketua Majelis Alit Desa Pekraman. **od**

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 7



## Kasus Dugaan Penyimpangan Perjalanan Dinas Sekretaris DPRD Denpasar Diperiksa 2,5 Jam

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya memeriksa Sekretaris DPRD Kota Denpasar, IGN Rai Suta pada, Kamis (11/6) terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas. Meski sudah diperiksa sekitar 2,5 jam, namun penyidik masih akan memeriksa lagi Rai Suta.

Sekretaris DPRD Kota Denpasar, Rai Suta datang sendirian ke Kejari Denpasar sekitar pukul 10.00 Wita. Ia langsung naik ke lantai II untuk menemui lima jaksa yang memeriksanya, yaitu Syahrir Sagir, Luga Harianto, Lumisensi, Kadek Wira dan Ari Suparma.

"Tadi saya langsung periksa bersama empat jaksa lainnya,"

jelas Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir. Ia mengatakan Rai Suta diperiksa karena menjadi pengguna anggaran (PA) untuk perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar. Pemeriksaan sendiri masih berkuat soal proses perjalanan dinas yang dilakukan 45 anggota DPRD Kota Denpasar. "Masih diperiksa seputar tugasnya sebagai pengguna ang-

aran," jelas Syahrir.

Ditambahkannya, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Rai Suta. Peralnya, saat akan ditanya terkait pokok permasalahan, Rai Suta tidak membawa data sehingga tidak bisa memastikan keterangannya. "Kami akan periksa lagi dengan membawa data-data yang lengkap," pungkas Syahrir.  rez

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 5



## Kasus Kelompok Sapi Fiktif Karangasem Sidang Perdana



• NUSABALI/REZA

SIDANG dawaan korupsi kelompok sapi fiktif dengan terdakwa I Made Juliasa, Mangku Laba dan Ni Made Sumertayanti di Pengadilan Tipikor Denpasar.

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi kelompok sapi fiktif di Karangasem dengan tiga terdakwa, yaitu Mangku Laba (Ketua Kelompok Sapi Pucung Sari), I Made Juliasa (anggota) dan Ni Made Sumertayanti (anggota) digelar perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Kamis (11/6). Dalam kasus ini, ketiga terdakwa merugikan negara Rp 500 juta.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eca Mariartha dkk di hadapan majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suarditha dijelaskan jika kasus ini berawal pada Juli 2011 saat Mangku Laba mengajak Juliasa dan Sumertayanti untuk mendirikan kelompok sapi Pucung Sari.

Saat itu, Mangku Laba sebagai ketua meminta kepada Sumertayanti untuk membuatkan proposal tentang kegiatan penyelamatan sapi Bali betina produktif yang ditujukan untuk Pemprov Bali. Namun, kelompok sapi yang didirikan ketiga terdakwa ternyata hanya akal-akalan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pasalnya, kelompok sapi Pucung Sari ternyata tidak pernah ada dan nama-nama anggotanya adalah fiktif. "Kelompok tani fiktif ini didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah Rp 500 juta," jelas JPU dalam tuntutanannya.

Pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kelautan (Disnakanlut) Karangasem lalu melakukan verifikasi kelompok tersebut. Ketiga terdakwa lalu meyakinkan Tim Disnakanlut terkait kelompok sapi Pucung Sari. Tidak lama setelah itu, pemerintah mencairkan dana bantuan untuk penyelamatan sapi Bali sebesar Rp 500 juta. Kasus ini sendiri terungkap setelah Tim Monitoring melakukan pengecekan dan meminta pertanggung jawaban kelompok sapi Pucung Sari. Setelah dicek, ternyata bukti pembelian 85 ekor sapi yang disebut sudah dibagikan kepada anggota kelompok ternyata fiktif. Akibatnya, negara dirugikan Rp 500 juta.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat pasal primer yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah dengan UU Tahun 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dalam dakwaan subsidair, ketiga terdakwa dijerat pasal 3 UU yang sama. Terdakwa melalui kuasa hukumnya I Ketut Bakuh dkk mengatakan akan melakukan eksepsi (keberatan atas dakwaan) dalam sidang selanjutnya. Sementara itu, majelis hakim tidak melakukan penahanan terhadap Sumertayanti. Sementara dua terdakwa lainnya yaitu Mangku Laba dan Juliasa tetap menjalani penahanan.  rez

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 2



★ Mangkir Saat Sidang Dugaan

Korupsi PIPANISASI Karangasem

# Peringatkan Geredeg

## Hakim Tipikor

Majelis hakim meminta jaksa menyampaikan agar Geredeg menghormati persidangan dan hadir untuk memberi keterangan dalam kasus tersebut.



DENPASAR, NusaBali

Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg yang dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi pipanisasi dengan terdakwa, IB Made Oka kembali mangkir. Majelis hakim pun mengingatkan kepada Geredeg untuk menghormati persidangan.

Rencananya, sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Kamis (11/6) mengagendakan pemeriksaan 6 saksi, yaitu Kepala Divisi VII PT Adhi Karya (2009), Wijaya Imam Santoso, Kepala Divisi VII PT Adhi Karya (2010), Dono Purwoko, eks Kadis PU Karangasem, Arnawa, staf PDAM Karangasem, Ketut Suta

• NUSABALI/YUDA  
SIDANG terdakwa korupsi pipanisasi Karangasem, IB Made Oka untuk mendengarkan saksi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (11/6).

dan Gede Sada serta Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg.

Namun di akhir persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suhardi dkk mengatakan jika Geredeg tidak bisa hadir dalam sidang karena sedang cek up kesehatan. "Saksi (Geredeg, red) sedang cek up jadi tidak bisa hadir. Kami akan panggil lagi untuk dihadirkan dalam sidang berikutnya," ujar JPU sambil menunjukkan surat keterangan dari Bupati Karangasem ini.

Usai membaca surat tersebut,

majelis hakim meminta jaksa menyampaikan agar Geredeg menghormati persidangan dan hadir untuk memberi keterangan dalam kasus ini. "Hormatilah persidangan ini," jelas Hasoloan sambil menutup sidang. Sementara itu, dua mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya yang membawahi Bali, NTB dan Maluku, yaitu Imam dan Dono yang diperiksa bersama-sama mengaku tidak tahu menahu soal pipa yang digunakan dalam proyek pipanisasi yang melintang di 4

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 5



kecamatan sepanjang 62 kilometer ini.

Kedua mantan petinggi PT Adhi Karya ini mengaku jika dirinya tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan pipa. "Saya hanya menerima laporan dari kepala proyek. Karena semua pengerjaan di lapangan termasuk pengadaan ditangani kepala proyek," jelas Imam yang juga diamini rekannya Dono.

Meski tidak pernah turun melakukan pengecekan, namun Imam mengaku jika pengerjaan proyek tersebut sudah sesuai kontrak. Meskipun dalam pengerjaannya pada 2009 tidak sampai selesai dan dilanjutkan pada tahun 2010. "Tahun 2009 proyek hanya selesai 82 persen. Lalu dilanjutkan pada 2010," bebernyanya.

Sementara dalam pemeriksaan eks Kadis PU Karangasem, Arnawa diketahui jika terdakwa sebagai PPTK yang melakukan pengadaan pipa yang akhirnya menjadi masalah. Bahkan Arnawa yang juga merupakan terpidana 2 tahun dalam kasus ini mengatakan jika pipa yang digunakan harganya sama tapi barangnya beda. "Pipa yang digunakan harganya memang sama dengan yang anggarkan, tapi barangnya beda. Ini baru saya ketahui setelah ada

pemeriksaan dari ITB," jelas Arnawa.

Sementara Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg kemarin memilih ke Surabaya bersama sejumlah anggota keluarganya. Sehingga rumah pribadinya di Jalan Nenas Amlapura, sepi. Petugas Sekretaris Pribadi dan petugas Satpam di rumah pribadi Geredeg di Jalan Nenas Amlapura menuturkan hal itu di Amlapura, Kamis (11/6).

"Bapak bersama keluarga, semuanya ke Surabaya. Saya tidak tahu kepentingan apa di sini sepi," ujar salah satu satpam di rumah pribadinya, yang enggan disebutkan jati dirinya. Sedangkan telepon Geredeg saat dihubungi tidak ada nada sambung, sehingga tidak didapatkan konfirmasi, apakah ke Surabaya terkait kepentingan dinas atau kepentingan pribadi.

Padahal, Kamis (11/6) Geredeg diagendakan menghadiri acara sosialisasi pembangunan melibatkan warga se-Kecamatan Karangasem di Gedung UKM Center Amlapura dan menghadiri sosialisasi tahapan Pilkada Karangasem di Aula Pemkab Karangasem yang di selenggarakan KPU Karangasem. Kedua acara tanpa kehadiran Geredeg. rez, k16

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 5



# Penyidik Polda Periksa Winasa di Rutan Negara

★ Diperiksa Selama 3 Jam dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang

NEGARA, NusaBali

Penyidik Dit Reskrimsus Polda memeriksa mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa, sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pembelian mesin kompos di Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (11/6). Pemeriksaan dalam rangka melengkapi berkas perkara kasus TPPU itu, dilakukan di dalam Rutan Kelas II B Negara, kurang lebih selama 3 jam.

Dari pemantauan *NusaBali*, rombongan penyidik dari Polda Bali yang terdiri dari tiga orang tiba di Rutan Negara, sekitar pukul 11.00 Wita. Tampak juga hadir I Nengah Nurlaba, penasehat hukum Winasa atas penunjukan pihak penyidik Polda Bali. Mereka pun langsung masuk ke dalam Rutan Negara. Setelah hampir 3 jam berada di dalam untuk melakukan pemeriksaan secara tertutup, pukul 14.00 Wita barulah penyidik keluar dari Rutan Negara, dan menyatakan pemeriksaan telah selesai. "Sudah, kita sudah selesai. Pemeriksaan berjalan cukup lancar, pertanyaan penyidik sudah gamblang dijelaskan," kata Kanit II Tindak Pidana Khusus Ditreskrimsus Polda Bali, Kompol Ida Bagus Putu Wedanajati.

Menurutnya, ada 6 pertanyaan inti yang diajukan kepada Winasa. Namun pihaknya tidak mau memberikan secara jelas mengenai pertanyaan apa saja itu. Yang jelas, katanya, semua berkaitan dengan penjaminan-penajaman materi untuk kelengkapan berkas perkara Winasa yang masih P-19, sesuai petunjuk dari Kejati Bali. "Ini memang dalam rangka kita untuk mengikuti petunjuk Jaksa," ujarnya.

Setelah pemeriksaan tambahan terhadap Winasa, ia juga mengaku akan berupaya segera merampungkan berkas perkaranya. Paling tidak minggu depan sudah bisa diajukan kembali ke Kejati Bali, untuk dilakukan penelitian kembali. Nantinya kalau dalam petunjuk dari Kejati Bali perlu ada penambahan kembali, baik



• NUSABALI/IB DIWANGKARA

KANIT II Tindak Pidana Khusus Ditreskrimsus Polda Bali, Kompol Ida Bagus Putu Wedanajati (kanan), bersama panasehat hukum Winasa, I Nengah Nurlaba (kiri), se usai pemeriksaan terhadap Winasa di Rutan Kelas II B Negara, Kamis (11/6).

dengan memeriksa tersangka Winasa ataupun pihak-pihak lain, pihaknya memastikan akan memenuhinya kembali.

"Sebelum pemeriksaan tambahan ke Pak Winasa, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kurang lebih ada sekitar 3 saksi yang sudah kita periksa," tukasnya. Sementara penasehat hukum Winasa, I Nengah Nurlaba, membenarkan pemeriksaan yang berjalan lancar. Dari Winasa, dikatakannya, tidak ada sanggahan ataupun protes terhadap pertanyaan yang diberikan. "Ya kooperatif dalam pemeriksaan. Berjalan lancar dan aman," ujar Nurlaba yang menjadi kuasa hukum Winasa atas penunjukan dari pihak penyidik Polda Bali ini. **od**

Edisi : Jumat, 12 Juni 2015

Hal : 5